

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afifah, W. (2018). Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia. *Mimbar Keadilan, I*(Pidana Pemilu), 13–28.
- Agung, M. (2019). PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. *Putusan .Mahkamahagung.Go.Id*.
- Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia. *De'Rechtsstaat, 5*(2), 137–103. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum, 48*(3), 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Ardianto, R. (2024). *Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024**Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024**Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemil. Bawaslu.* <https://bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>
- Arif Prasetyo, W., Eka Wisnu, W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(2), 3217–3225.
- Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Pegguruang, 1*(2), 88–95.
- Asshiddiqie, D. J. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia.* 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi, 20*(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Erwinsyahbana, T. (2018). Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *INA-Rxiv Papers, November*, 6–8.

- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1711/pdf/3458>
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Institut Agama Islam Tribaki Kediri*, 28, 282. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/472/318>
- Gialdah Tapiansari B. dan Tien S. Hulukati, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”. Setara Press: Bandung. 2019
- Gusti, I, A. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Hukum*, 1(1), 21–30. <https://ejournal.unipias.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 220. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>
- Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 74–85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>
- Mufidah, A., & Syarofi, A. (2024). HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *THE REPUBLIC: Journal Of Constitutional Law*, 1(2), 35–51. <https://doi.org/10.55352/The>
- Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 4(1), 130–152.
- Nasution, L. (2020). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *'Adalah*, 1(9), 83–84. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>
- Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik

- Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97>
- Prayinto, O. S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. *Journal KPU RI*, 1(1), 1–18.
- Ramadhan, M. N. (2021). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115–127. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>
- Rikardo, O. (2020). PENERAPAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Ofis Rikardo 1. *Jurnal Hukum Sasana*, 6, 51–71.
- Risman, L. O. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu. *Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 202–218. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/43/18/64>
- Riwanto, A. A. U. dkk. (2019). *Perihal penegakan hukum pemilu* (Bawaslu (ed.); 1st ed.). Bawaslu.
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192–196. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>
- Sinaga, R. Y. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, Vol.1,(No.3), p.212-221.
- Singh, R., & Syahur, T. (2023). *Teori kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi*. 2(7), 31–40.
- Sudibyoy, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- Sugianto, B. (2017). *ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017*. IX, 1–23.
- Supriyadi. (2020). Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi

- Pemilu/Pilkada). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No.(2), 145.  
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>
- Surbakti, A. R. (2018). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*.
- Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 84–93.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>
- Syamsudin, A. (2016). *PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*. 0, 1–23.
- Syarifudin, A. (2020). Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu. *Cepalo*, 4(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1897>
- Wasisto Aryo. (2024). Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XVI(No. 3/I/Pusaka/Februari/2024), 8.
- Wibowo, A. (2021). Kewenangan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu (Studi Tentang Money Politik Dan Netralitas Asn). *Lex Privatum*, IX(7), 27–37.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34707%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/34707/32555>
- Wijaya, H. (2020). Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 84–85.
- Yusdiyanto, Y. (2017). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 259–272. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>
- Zulfikhar. (2023). Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5, 27–46.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.